

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI REMBANG  
NOMOR 36 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN  
MODAL KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2016–2025.

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN REMBANG

A. Pendahuluan

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagai upaya terus menerus ke arah perubahan yang lebih baik guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan yang berskala regional, nasional maupun global. Pelaksanaan pembangunan dimaksud memerlukan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat luas, terutama pihak swasta.

Pembangunan ekonomi yang di dalamnya melibatkan pihak swasta berupa penanaman modal asing maupun dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan penanaman modal merupakan langkah awal dalam menciptakan sumber produksi untuk mewujudkan sebuah kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi suatu daerah terkait erat dengan tingkat penanaman modal. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2011-2014) mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,27%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 5,41% dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 5,15%.

Pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2014 terjadi pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 17,90% disusul Informasi dan Komunikasi sebesar 17,16% dan Industri Pengolahan sebesar 15,04% serta Konstruksi sebesar 14,65%, dengan struktur pendukung terbesar ada pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 29,10%, sektor Industri Pengolahan sebesar 20,84% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,68%. Tingginya sektor-sektor tersebut dapat disebabkan karena imbas dari meningkatnya pertumbuhan konsumsi masyarakat.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai potensi yang dimiliki. Agar pembangunan daerah berjalan lancar, pemerintah Kabupaten Rembang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang, visi yang ingin dicapai adalah mewujudkan Kabupaten Rembang yang Mandiri, Maju dan Sejahtera. Dengan visi tersebut, salah

satu misi yang diusung adalah untuk memacu pertumbuhan investasi dalam rangka menghidupkan dan meningkatkan perkembangan sektor riil dan peningkatan kesempatan kerja. Secara tegas misi tersebut menyatakan pentingnya investasi sebagai tolok ukur sektor riil sekaligus pentingnya investasi sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja. Karenanya investasi merupakan kegiatan yang sangat menentukan dalam pembangunan ekonomi. Pengertian investasi adalah belanja untuk barang-barang modal dengan tujuan untuk memperbesar kapasitas atau menciptakan sumber produksi dalam suatu wilayah ekonomi. Karena itu investasi akan menambah stok modal, dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap pendapatan.

Pada Tahun 2015, realisasi investasi Kabupaten Rembang mengalami peningkatan yang sangat besar sebesar Rp. 3,478 Trilyun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 hanya sebesar Rp. 646,83 Milyar. Peningkatan realisasi investasi ini lebih disebabkan PT. Semen Gresik di Desa Pasucen Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang sudah mulai merealisasikan investasinya dengan besar realisasi investasi sebesar Rp. 2,684 Trilyun dengan menyerap tenaga kerja sebesar 3.817 tenaga kerja pada saat tahap pembangunan ini dan diperkirakan selesai di tahun 2016 dengan total investasi sebesar Rp. 3,7 Trilyun.

Kabupaten Rembang berada di ujung timur Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur yang berada di jalur pantai utara Jawa yang menghubungkan antara Jakarta – Surabaya yang merupakan jalur emas untuk perekonomian. Di Kabupaten Rembang saat ini sudah tersedia sebuah pelabuhan, yaitu Pelabuhan Tanjung Bonang, di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang yang diharapkan mampu menarik calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Rembang yang juga didukung dengan adanya PLTU Rembang di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang dengan kapasitas 2 X 315 MW, selain itu Kabupaten Juga mempunyai kekayaan alam yaitu selain sektor pertambangan adalah sektor perikanan dengan panjang pantai yang dimiliki sebesar 62 Km yang juga sangat potensial untuk dapat dikembangkan potensi pariwisatanya untuk menarik masyarakat khususnya yang melintas di Kabupaten Rembang.

Tujuan penyelenggaraan investasi dalam rangka mendorong perkembangan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja dapat tercapai apabila faktor penunjang penanaman modal dapat dikembangkan. Pada saat yang bersamaan faktor yang penghambat terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif dapat diatasi. Dinamika investasi sangat bergantung iklim usaha di suatu wilayah ekonomi. Investasi akan berkembang di wilayah ekonomi dengan iklim investasi dan usaha yang kondusif. Begitu juga sebaliknya. Beberapa faktor yang menentukan iklim investasi antara lain adalah persoalan hubungan industrial, jaminan dan kepastian hukum dan keamanan, perijinan dan dukungan infrastruktur maupun suprastruktur.

Dalam sistem pemerintahan yang desentralistik, penanaman modal merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk melaksanakan misi pertumbuhan investasi dalam rangka menghidupkan dan meningkatkan perkembangan sektor riil dan peningkatan kesempatan kerja, Pemerintah Kabupaten Rembang perlu menetapkan pedoman mengenai arah, strategi dan kebijakan penanaman modal di dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

Pedoman tersebut disusun berupa suatu dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Rembang.

## B. Asas dan Tujuan

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mengembangkan penanaman modal dengan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Rembang berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanaman modal, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu :

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan berwawasan lingkungan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## C. Visi dan Misi

Visi penanaman modal Kabupaten Rembang sampai tahun 2025 adalah “Mewujudkan Kabupaten Rembang yang ramah investasi menuju masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera”. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang penanaman modal untuk mewujudkan pelayanan investasi yang handal, responsive, dan menyelesaikan masalah;
2. mengembangkan komoditi daerah yang unggul dan berdaya saing, melalui penanaman modal yang lebih inklusif;
3. mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;
4. meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Rembang melalui sinergi kelembagaan terkait penanaman modal;
5. mewujudkan ekonomi Kabupaten Rembang yang berwawasan lingkungan demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

## D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

### 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah pertama dalam kebijakan rencana umum penanaman modal adalah mengenai perbaikan iklim penanaman modal. Perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Rembang dilakukan dengan kebijakan penguatan dan sinergi kelembagaan untuk menumbuhkan iklim investasi yang kondusif, dengan strategi kebijakan yang diambil sebagai berikut :

- a. peningkatan sinergi dan harmonisasi peraturan perundangan terkait dengan penanaman modal; dan

b. penyederhanaan prosedur dan tata laksana penanaman modal.

Program-program penguatan dan sinergi kelembagaan untuk menumbuhkan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Rembang sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- ✓ penguatan dan sinergi kelembagaan penanaman modal;
- ✓ penguatan persaingan iklim usaha yang sehat;
- ✓ harmonisasi hubungan industrial;
- ✓ penguatan dan keterpaduan sistem informasi penanaman modal; dan
- ✓ penjaminan kepastian hukum dalam berusaha.

## 2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan kedua, mengenai persebaran penanaman modal dengan mendorong persebaran dan pemerataan penanaman modal di Kabupaten Rembang dengan strategi yang diambil adalah persebaran dan pemerataan penanaman modal di Kabupaten Rembang berbasis spasial dan sektoral. Arah kebijakan terkait persebaran dan pemerataan penanaman modal di Kabupaten Rembang dilakukan dengan program-program sebagai berikut :

- ✓ penguatan pusat-pusat pertumbuhan yang bersifat spasial, berbasis potensi lokal dan terintegrasi baik antar wilayah, antar sektor dan antar fungsi;
- ✓ meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana produksi dan distribusi barang dan jasa; dan
- ✓ peningkatan interkoneksi dan akses antar wilayah.

## 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Pariwisata

Arah kebijakan ketiga adalah fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan pariwisata. Fokus yang dituju adalah untuk menumbuhkan daya saing secara berkelanjutan dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Dalam hal pangan, selain memiliki sektor pertanian pangan, potensi Kabupaten Rembang sebagai daerah penghasil sumber daya perikanan juga patut diperhatikan. Pada masalah infrastruktur Kabupaten Rembang memiliki lokasi strategis di wilayah pantai utara (pantura) dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Kabupaten Rembang memiliki potensi mengembangkan sektor pariwisata, yaitu dengan adanya panjang pantai 63,5 Km yang dimiliki dan pegunungan yang ada di Kabupaten Rembang. Terkait isu-isu tersebut, maka arah kebijakan fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi adalah memprioritaskan penanaman modal pada pengembangan sektor ekonomi yang mempunyai daya saing dan keterkaitan kuat, baik keterkaitan kedepan maupun kebelakang, dengan strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan agrobisnis dan agro-industri yang mempunyai potensi keunggulan kompetitif dan keterkaitan kuat;
- b. pengembangan sektor perdagangan sebagai basis perekonomian;
- c. pengembangan industri manufaktur potensial;
- d. pengembangan industri kreatif daerah.

Terkait dengan arah kebijakan ketiga, yang akan dilakukan adalah dengan melaksanakan program-program sebagai berikut:

- ✓ penguatan dan peningkatan produktivitas pertanian primer melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan teknologi pertanian sebagai basis ketahanan pangan dan keunggulan daerah;
- ✓ penguatan industri pengolahan berbasis sumber daya (*resources-based*) dan industri bernilai tambah tinggi;

- ✓ pengembangan industri-industri yang berbasis pada keunggulan kompetitif dan mempunyai keterkaitan kuat kepada industri lainnya;
  - ✓ penguatan dan pengembangan industri jasa perdagangan dan mempunyai keterkaitan kuat kepada industri lainnya;
  - ✓ penguatan dan fasilitas industri kreatif daerah; dan
  - ✓ pengembangan agro-industri sebagai basis daya saing produk/komoditi daerah.
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan
- Masalah penanaman modal juga terkait dengan isu-isu pembangunan keberlanjutan dan lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan merupakan syarat peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang. Untuk mencapai hal tersebut, maka arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Rembang adalah dengan mengambil kebijakan penanaman modal inklusif, penanaman modal inklusif ini dilaksanakan dengan strategi pengembangan penanaman modal dengan pengutamakan kelestarian lingkungan. Adapun program-program yang terkait dengan arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:
- ✓ pendekatan ekonomi hijau (*green economy*);
  - ✓ pemanfaatan sumber energi terbarukan;
  - ✓ mengedepankan pendekatan inklusif; dan
  - ✓ penggunaan teknologi ramah lingkungan.
5. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- Dalam dinamika perekonomian nasional, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu tulang punggung dalam menyerap tenaga kerja dan berkontribusi pada output nasional. Oleh karena itu, UMKM juga berhak untuk berkontribusi dan mengambil manfaat dari adanya pembangunan ekonomi. Aspek penanaman modal juga harus memperhatikan masalah pemberdayaan UMKM dengan melakukan kebijakan pemberdayaan UMKM.
- Kebijakan pemberdayaan UMKM ini dilaksanakan dengan menggunakan 4 (empat) strategi, yaitu:
- a. peningkatan akses UMKM kepada lembaga-lembaga keuangan dan permodalan;
  - b. peningkatan akses UMKM kepada pasar produk UMKM;
  - c. penguatan kompetensi sumber daya UMKM;
  - d. penguatan daya saing UMKM.
- Sedangkan program-program yang akan dilaksanakan dalam kebijakan Pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut :
- ✓ fasilitasi akses UMKM kepada lembaga-lembaga keuangan dan permodalan melalui penguatan aspek manajerial UMKM;
  - ✓ perbaikan aksesibilitas UMKM kepada pasar-pasar produk UMKM;
  - ✓ penguatan aspek manajerial UMKM;
  - ✓ perbaikan dan peningkatan aksesibilitas UMKM kepada informasi pasar dan penerapan teknologi;
  - ✓ perlindungan usaha UMKM terhadap persaingan usaha tidak sehat;
  - ✓ peningkatan kewirausahaan masyarakat; dan
  - ✓ penguatan aliansi antara UMKM dengan industri industri besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

6. Pemberian Fasilitas Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal  
Keputusan investor dalam menanamkan modalnya turut dipengaruhi oleh pemberian fasilitas kemudahan, dan atau insentif yang diberikan oleh pemerintah. Investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya pada daerah yang memberikan insentif, misalnya insentif fiskal dalam bentuk keringanan pajak. Pemerintah memberikan hal tersebut dengan harapan jika ada penanaman modal ada di daerahnya maka akan ada peningkatan aktivitas ekonomi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, karena itu perlu diambil kebijakan, yaitu dengan fasilitasi dan insentif penanaman modal. Kebijakan ini didukung dengan adanya 2 (dua) strategi, yaitu :

- a. penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur; dan
- b. pemberian insentif perpajakan dan redistribusi.

Sedangkan program-program yang akan dilaksanakan pada kebijakan ini adalah:

- a. pemberian berbagai kemudahan pada kegiatan penanaman modal prioritas tinggi dan pionir;
- b. penyediaan dan ketercukupan prasarana dasar secara berkesinambungan;
- c. Penyediaan dan atau pemberian fasilitas untuk tersediannya sumber daya manusia yang kompeten;
- d. pembangunan dan penyediaan kawasan industri dan perdagangan;
- e. pemberian fasilitas dan insentif pajak dan redistribusi daerah;
- f. konektivitas antara lembaga pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja; dan
- g. pengembangan infratsruktur-infrastruktur yang merupakan *prime-mover* aktivitas ekonomi.

#### 7. Promosi Penanaman Modal

Informasi mengenai potensi suatu daerah akan sangat bermanfaat bagi investor dalam memutuskan akan menanamkan modalnya dimana. Oleh karena itu, promosi penanaman modal menjadi penting dalam menarik minat investor. Arah kebijakan untuk promosi penanaman modal adalah dengan melaksanakan promosi penanamn penanaman terpadu dan terintegrasi, dengan melaksanakan 3 (tiga) strategi sebagai berikut:

- a. pengembangan sistem informasi penanaman modal terpadu;
- b. optimalisasi teknologi informasi untuk promosi investasi;
- c. peningkatan kerjasama antar *stakeholders*.

Sedangkan program-program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- ✓ kerjasama terpadu antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan;
- ✓ penyediaan dan pengembangan sistem informasi investasi dan sistem informasi penanaman modal dan sistem informasi pasar secara terpadu dan berkelanjutan;
- ✓ forum komunikasi antara pemerintah dan entitas bisnis.

Arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Rembang

NO	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
1	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Penguatan dan sinergi kelembagaan untuk menumbuhkan iklim investasi yang kondusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sinergi dan harmonisasi peraturan perundangan terkait dengan penanaman modal</li> <li>• Penyederhanaan prosedur dan tatalaksana penanaman modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harmonisasi dan penyederhanaan peraturan yang terkait perijinan</li> <li>• Penguatan persaingan iklim usaha yang sehat</li> <li>• Harmonisasi hubungan industrial</li> <li>• Penguatan dan keterpaduan sistem informasi penanaman modal</li> <li>• Jaminan kepastian hukum dalam berusaha</li> </ul>
2	Persebaran Penanaman Modal	Mendorong Persebaran dan Pemerataan Penanaman modal	Persebaran dan Pemerataan Penanaman Modal berbasis spasial dan sektoral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan pusat-pusat pertumbuhan yang bersifat spasial, berbasis potensi lokal dan terintegrasi baik antar wilayah, antar sektor, dan antar fungsi</li> <li>• Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana produksi dan distribusi barang dan jasa</li> <li>• Peningkatan interkoneksi dan akses antar wilayah</li> </ul>
3	Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Pariwisata	Prioritas Penanaman Modal pada Pengembangan sektor ekonomi yang mempunyai daya saing dan keterkaitan kuat, baik keterkaitan ke depan maupun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan agrobisnis dan agro-industri yang mempunyai potensi keunggulan kompetitif dan keterkaitan kuat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan dan peningkatan produktivitas pertanian primer melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan teknologi pertanian sebagai basis ketahanan</li> </ul>

		ke belakang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sektor perdagangan sebagai basis perekonomian</li> <li>• Pengembangan industri manufaktur potensial</li> <li>• Pengembangan industri kreatif daerah</li> </ul>	<p>pangan dan keunggulan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan industri pengolahan berbasis sumber daya (<i>resources-based</i>) dan industri bernilai tambah tinggi</li> <li>• Pengembangan industri-industri yang berbasis pada keunggulan kompetitif dan mempunyai keterkaitan kuat kepada industri lainnya,</li> <li>• Penguatan dan pengembangan industri jasa perdagangan dan mempunyai keterkaitan kuat kepada industri lainnya.</li> <li>• Penguatan dan fasilitasi industri kreatif daerah</li> <li>• Pengembangan agro-industri sebagai basis daya saing produk/komoditi daerah</li> </ul>
4	Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan	Penanaman Modal Inklusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Penanaman Modal dengan pengutamakan kelestarian lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendekatan ekonomi hijau (<i>green economy</i>)</li> <li>• Pemanfaatan sumber energi terbarukan</li> <li>• Mengedepankan pendekatan inklusif</li> <li>• Penggunaan teknologi ramah lingkungan</li> </ul>
5	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses UMKM kepada lembaga keuangan dan permodalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi akses UMKM kepada lembaga-lembaga keuangan dan permodalan</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan akses UMKM kepada pasar produk UMKM</li> <li>• Penguatan kompetensi sumber daya UMKM</li> <li>• Penguatan daya saing UMKM</li> </ul>	<p>melalui penguatan aspek manajerial UMKM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan aksesibilitas UMKM kepada pasar-pasar produk UMKM</li> <li>• Penguatan aspek manajerial UMKM</li> <li>• Perbaikan dan peningkatan aksesibilitas UMKM kepada informasi pasar dan penerapan teknologi</li> <li>• Perlindungan usaha UMKM terhadap persaingan usaha tidak sehat</li> <li>• Peningkatan kewirausahaan masyarakat</li> <li>• Penguatan aliansi antara UMKM dengan industri besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas</li> </ul>
6	Pemberian Fasilitas Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Fasilitasi dan Insentif Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur</li> <li>• Pemberian insentif perpajakan dan restribusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian kemudahan pada pengembangan industri-industri prioritas dan perintis</li> <li>• Penyediaan dan ketercukupan prasarana dasar</li> <li>• Penyediaan dan atau pemberian fasilitas untuk tersediannya sumber daya manusia yang kompeten</li> <li>• Pembangunan dan penyediaan kawasan industri dan perdagangan</li> <li>• Pemberian fasilitas, insentif pajak dan</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>retribusi</li> <li>• Konektivitas antara lembaga pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja</li> <li>• Pengembangan infrastruktur-infrastruktur yang merupakan <i>prime-mover</i> aktivitas ekonomi</li> </ul>
7	Promosi Penanaman Modal	Promosi Penanaman Modal Terpadu dan Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Terpadu</li> <li>• Optimalisasi teknologi informasi untuk promosi investasi</li> <li>• Peningkatan kerjasama antar <i>stakeholders</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama terpadu antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan</li> <li>• Penyediaan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan sistem informasi pasar secara terpadu dan berkelanjutan</li> <li>• Forum komunikasi antara pemerintah dan entitas bisnis</li> </ul>

#### E. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Rembang

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Rembang sampai dengan tahun 2025 disusun dalam 2 (dua) Tahap yang saling berkaitan.

Tahapan-tahapan pencapaian penanaman modal berfungsi sebagai indikator arah pencapaian visi pembangunan ekonomi Kabupaten Rembang melalui penanaman modal. Di samping itu, tahapan pencapaian ini ditetapkan untuk menjadi pedoman dan panduan skala prioritas penanaman modal dalam rangka menyusun skala prioritas tahunan, sekaligus berperan sebagai bahan dasar untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal, dan kemudian berdasarkan indikator tersebut dapat dilakukan perbaikan arah dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana penanaman modal jangka panjang.

##### Tahap I (Tahun 2016 – 2020)

Pada Tahap I, kebijakan penanaman modal di Kabupaten Rembang diprioritaskan pada peningkatan intensitas penguatan kelembagaan dan penanaman modal yang mampu membuahkan hasil dengan cepat dan mempunyai keterkaitan kuat pada industri lain dan penyediaan prasarana. Untuk mencapai keadaan tersebut, porsi penanaman modal di Kabupaten Rembang dilakukan dengan prioritas berikut:

1. menguatkan kelembagaan dengan melakukan konsolidasi baik dalam tata laksana maupun organisasi penanaman modal;
2. meningkatkan penyediaan dan kualitas infrastruktur utama dengan fokus mengatasi berbagai masalah berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur yang belum ada dan memperluas jaringan infrastruktur ke wilayah-wilayah yang relatif masih terbatas infrastrukturnya khususnya di daerah dengan ciri pedesaan sehingga pemerataan infrastruktur semakin baik;
3. meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dengan menguatkan dan mengembangkan jaringan informasi (dengan pemerintah daerah dalam provinsi dan pemerintah daerah antar provinsi) menjadi semakin terpadu, semakin cepat, semakin terkoordinasi, sehingga akan dapat semakin meningkatkan kepastian usaha dan mendorong perluasan pasar dan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang;
4. meningkatkan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaringan usaha dan antar instansi, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional dan internasional;
5. meningkatkan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha kecil dan mikro, dan menyebarkan secara sistematis informasi mengenai usaha kecil tersebut kepada para pemangku kepentingan sehingga usaha kecil dan mikro akan semakin mendapat prioritas dalam pengembangan perekonomian dan akan semakin memperkuat posisi usaha kecil dan mikro dalam perekonomian baik lokal maupun nasional;
6. mengembangkan penanaman modal dengan mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di Kabupaten Rembang yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup, berbasis kekuatan dan keunggulan yang dimiliki kabupaten Rembang, dan semakin merata;
7. membangun dasar-dasar yang kuat untuk penciptaan *branding*.

#### Tahap II (Tahun 2021 – 2025)

Akhir periode tahap Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025 pendapatan perkapita Kabupaten Rembang mencapai sekitar 1,5 kali pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Rembang pada periode Pembangunan Jangka Menengah ke-1. Untuk mencapai keadaan tersebut, penanaman modal di Kabupaten Rembang dilakukan dengan prioritas berikut:

1. melanjutkan penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur utama dengan fokus dan jangkauan yang semakin luas dengan cara mengatasi berbagai masalah berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur yang belum terselesaikan pada periode pembangunan tahap sebelumnya dan memperluas jaringan infrastruktur ke wilayah-wilayah yang relatif masih terbatas infrastrukturnya khususnya di daerah pedesaan sehingga pemerataan infrastruktur semakin baik;
2. meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dengan mengembangkan jaringan informasi (dengan pemerintah daerah dalam provinsi dan pemerintah daerah antar provinsi) menjadi semakin terpadu, semakin cepat, semakin terkoordinasi, sehingga akan dapat semakin meningkatkan kepastian usaha dan mendorong perluasan pasar dan keberlangsungan usaha dalam jangka

- panjang, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional dan internasional;
3. mengintensifkan peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaringan usaha dan antar instansi;
  4. mengintensifkan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha kecil dan mikro, sehingga usaha kecil dan mikro secara bertahap akan semakin mendapat prioritas dalam akses kepada lembaga-lembaga keuangan dan pemasaran dan semakin kuat posisinya dalam dalam perekonomian baik lokal maupun nasional;
  5. memantapkan pengembangan penanaman modal bekerjasama dengan daerah *hinterland* Kabupaten Rembang;
  6. memantapkan *branding* Kabupaten Rembang.

Matrik peta panduan (*roadmap*) implementasi rencana umum penanaman modal Kabupaten Rembang

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	TAHAP I (TAHUN 2016 – 2020 )	TAHAP II (TAHUN 2021 – 2025 )
1	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat kelembagaan dengan melakukan konsolidasi baik dalam tata laksana maupun organisasi penanaman modal</li> </ul>	
2	Bidang Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan penyediaan dan kualitas infrastruktur utama dengan fokus mengatasi berbagai masalah berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur yang belum ada dan memperluas jaringan infrastruktur ke wilayah-wilayah yang relatif masih terbatas infrastrukturnya khususnya di daerah dengan ciri pedesaan sehingga pemerataan infrastruktur semakin baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melanjutkan penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur utama dengan fokus dan jangkauan yang semakin luas dengan cara mengatasi berbagai masalah berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur yang belum terselesaikan pada periode pembangunan tahap sebelumnya dan memperluas jaringan infrastruktur ke wilayah-wilayah yang relatif masih terbatas infrastrukturnya</li> </ul>

			<p>khususnya di daerah pedesaan sehingga pemerataan infrastruktur semakin baik</p>
3	Bidang Pelayanan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dengan menguatkan dan mengembangkan jaringan informasi (dengan pemerintah daerah dalam provinsi dan pemerintah daerah antar provinsi) menjadi semakin terpadu, semakin cepat, semakin terkoordinasi, sehingga akan dapat semakin meningkatkan kepastian usaha dan mendorong perluasan pasar dan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang</li> <li>• Meningkatkan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaringan usaha dan antar instansi, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional dan internasional</li> <li>• Meningkatkan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha kecil dan mikro, dan menyebarluaskan secara sistematis informasi mengenai usaha kecil tersebut kepada para pemangku kepentingan sehingga usaha kecil dan mikro akan semakin mendapat prioritas dalam pengembangan perekonomian dan akan semakin memperkuat posisi usaha kecil dan mikro dalam perekonomian baik lokal maupun nasional</li> <li>• Mengembangkan penanaman modal dengan mengidentifikasi proyek-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dengan mengembangkan jaringan informasi (dengan pemerintah daerah dalam provinsi dan pemerintah daerah antar provinsi) menjadi semakin terpadu, semakin cepat, semakin terkoordinasi, sehingga akan dapat semakin meningkatkan kepastian usaha dan mendorong perluasan pasar dan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional dan internasional</li> <li>• Mengintensifkan peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaringan usaha dan antar instansi</li> <li>• Mengintensifkan penyediaan informasi yang semakin komprehensif,</li> </ul>

		<p>proyek penanaman modal di Kabupaten Rembang yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup, berbasis kekuatan dan keunggulan yang dimiliki kabupaten Rembang, dan semakin merata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun dasar-dasar yang kuat untuk penciptaan <i>branding</i></li> </ul>	<p>akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha kecil dan mikro, sehingga usaha kecil dan mikro secara bertahap akan semakin mendapat prioritas dalam akses kepada lembaga-lembaga keuangan dan pemasaran dan semakin kuat posisinya dalam dalam perekonomian baik lokal maupun nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantapkan pengembangan penanaman modal bekerjasama dengan daerah <i>hinterland</i> Kabupaten Rembang</li> <li>• Memantapkan <i>branding</i> Kabupaten Rembang</li> </ul>
--	--	--	---

#### F. Target Penanaman Modal Kabupaten Rembang

Pada akhir pembangunan jangka panjang di tahun 2025, kondisi perekonomian Kabupaten Rembang diperkirakan mampu meningkat jauh lebih tinggi dari kondisi tahun 2014. Tahun 2025 diharapkan pendapatan perkapita (riil) penduduk Kabupaten Rembang mampu meningkat satu setengah kali lipat dari Rp. 16.667.478,- dari tahun 2014 menjadi Rp. 26.099.382- pada tahun 2025.

Untuk mencapai proyeksi tersebut diatas dibutuhkan penanaman modal langsung, baik penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah berupa belanja modal maupun penyertaan modal dan penanaman modal yang dilakukan oleh swasta, baik penanaman modal asing (PMA) ataupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Penanaman modal pemerintah diperlukan untuk menyediakan berbagai fasilitas publik berupa infrastruktur dan sarana publik dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang semakin baik dan persediaan eksternalitas guna mendorong dan mengakselerasi penanaman modal oleh swasta, sehingga tercipta iklim usaha yang semakin kondusif. Kebutuhan penanaman modal swasta diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin besar dan untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang semakin luas pada berbagai sektor

ekonomi secara berkesinambungan. Selain itu, melalui kemitraan pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) juga memungkinkan adanya kerjasama penanaman modal pemerintah dan swasta.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Kabupaten Rembang sebagaimana diinginkan pada tahun 2025, diperlukan penanaman modal yang bukan hanya jumlah dan porsi yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim penanaman modal yang semakin baik. Asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2014 – 2025 sebesar rata-rata 5,27 % dengan target nilai investasi Kabupaten Rembang sampai dengan 2025 sebesar Rp. 6,701 Trilyun.

Untuk mendorong tumbuhnya perekonomian sehingga mencapai tingkat yang diharapkan, pemerintah mengambil peran terutama dalam bentuk penanaman modal publik yang diharapkan akan mampu mengakselerasi peran swasta yang semakin besar dengan menyediakan infrastruktur dan atau sarana lain yang mendukung tercapainya pelayanan yang semakin optimal dan efisien serta mendukung perekonomian yang semakin meningkat.

Target Nilai Realisasi Investasi Kabupaten Rembang  
Tahun 2016 s/d 2025

No.	Tahun	Target Realisasi Investasi
Tahap I ( Tahun 2016 s/d 2020 )		
1.	2016	Rp. 4.140.389.000.000,-
2.	2017	Rp. 4.326.707.000.000,-
3.	2018	Rp. 4.521.408.000.000,-
4.	2019	Rp. 4.747.479.000.000,-
5.	2020	Rp. 5.008.590.000.000,-
Tahap II ( Tahun 2021 s/d 2025)		
6.	2021	Rp. 5.259.020.000.000,-
7.	2022	Rp. 5.548.266.000.000,-
8.	2023	Rp. 5.881.162.000.000,-
9.	2024	Rp. 6.263.473.000.000,-
10.	2025	Rp. 6.701.878.000.000,-

G. Pelaksanaan

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Rembang memerlukan langkah kongkrit pelaksanaan, yaitu SKPD teknis terkait dapat menyusun kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan penanaman modal, mengacu kepada Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Rembang.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ